

Popularitas Selebriti sebagai Komoditas Politik

Wahyuni Choiriyati dan Ida Wiendijarti
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jl. Babarsari No.2 Yogyakarta 55281 Telp. 0274-485268 Fax. 0274-487147
HP. 085885795102, e-mail: wahyu_choiri@yahoo.com

Abstract

The practices of stereotyped as a female artist in the party political pollster, conducted by the method of Fairclough with Critical Discourse Analysis. This research refers to the opinion that analysis was based on the big question, how to connect the text with the micro and macro social context. Great attention from this research was to see how the language user brings a certain ideological values on text. Language is seen as the perspective that carries certain consequences. Language is socially and historically is a form of action, in a dialectical relationship with social structure. Therefore, the analysis should focus on how language was formed and shaped from social relationships and social context. This study to see Rubric of figures in Tempo magazine which covering celebrity politicians. Based on the overall results of this study, it can be concluded that the subordination of patriarchy is immortalized in the text produced by the crew of the media, in this reporter through the selection process, involving an ideology that is not sensitive to the interests of politicians defending female celebrities in the political sphere.

Abstrak

Banyak partai politik menggunakan artis perempuan sebagai pengumpul suara dalam pemilihan umum (pemilu). Riset ini bertujuan mendeskripsikan upaya-upaya membongkar praktik stereotip artis perempuan sebagai pengumpul suara di partai politik, dilakukan dengan metode *Critical Discourse Analysis Fairclough* dengan melihat hubungan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Titik perhatian riset ini adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu dan dianalisis secara menyeluruh. Bahasa dilihat sebagai perspektif yang membawa konsekuensi tertentu. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu. Kajian ini menemukan dinamika Rubrik Pokok dan Tokoh yang termuat dalam majalah Tempo mengenai liputan selebriti politisi. Terdapat subordinasi patriarki yang dilanggengkan dalam teks yang diproduksi oleh awak media (dalam hal ini wartawan) yang telah melalui proses seleksi *gatekeeping* dengan melibatkan struktur redaksi media yang bersangkutan.

Kata kunci: ideologi media dan selebriti politisi

Pendahuluan

Reformasi telah menciptakan posisi tawar yang lebih dominan pada politisi dibandingkan pada masa sebelumnya. Situasi ini mendatangkan *euphoria* politik yang mengharuskan adanya peningkatan kemampuan komunikasi politik para politisi. Maraknya aktifitas politik yang dilakukan oleh politisi merupakan fenomena menarik untuk dicermati. Upaya membangun sebuah citra positif menjadi sebuah kerja besar. Salah satunya menerapkan sebuah pencitraan partai politik dengan menghadirkan sosok yang mampu menaikkan citra partai, seperti menghadirkan artis perempuan dalam aktifitas komunikasi politik partai. Dalam Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan terdapat 35 partai politik yang lolos dan segera mengikuti proses verifikasi lapangan (Tempo, 2-8 Juni 2008). Dalam era demokratisasi jumlah partai sebanyak ini adalah hal yang positif dan mestinya tidak di hambat untuk terlibat dalam kancah pemilu. Sistem pemilu di Indonesia seharusnya mulai mengakomodir ekspresi politik massa ini, dengan model-model pemilihan seperti di negara lain. Semua geliat politik ini masih belum terlihat perubahan yang signifikan dari kaum perempuan dalam berpolitik. Realitas saat ini, kaum perempuan sudah diakomodir di partai-partai politik yang ada, namun kenyataan tersebut belum dapat dikatakan sebagai representasi dari kaum perempuan dalam panggung politik. Kaum perempuan sudah ada yang menduduki jabatan-jabatan politik atau publik, seperti di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan sudah ada yang pernah menjadi presiden, namun fakta kuota perempuan di DPR sering paradoks jika diletakkan dalam konteks bagaimana membebaskan kaum perempuan dari wacana perempuan politisi dalam konstruksi media.

Diskusi mengenai perempuan dan politik selalu menarik dibicarakan, dalam wacana hegemoni patriarki kaum perempuan diposisikan sebagai objek (korban). Negara mengadvokasi hak-hak perempuan dengan tawaran perempuan boleh masuk ke panggung politik. Dalam beberapa momentum kaum perempuan diharapkan ambil bagian dalam *job description* kaum laki-laki meliputi profesi; sopir, pilot, dosen, politisi, dan pejabat publik. Negara memandang perempuan te-

tap sebagai warga negara kelas dua yang mencuat karena ada kelebihan-kelebihan atau di luar potensi fisiknya maka mereka boleh menempati ruang-ruang yang mestinya untuk laki-laki. Sebenarnya partisipasi perempuan ini menjadi sangat terbatas, hanya perempuan kelas atas, terkenal, dan sedikitnya harus mempunyai potensi mengangkat kelompoknya. Jagat politik di Indonesia banyak dihiasi oleh sosok-sosok populer, cantik, tampan, terkenal, dan *public figure* dari dunia hiburan.

Kehadiran Marissa Haque dan Angelina Sondakh sebagai politisi hasil dari Pemilu tahun 2004 yang berasal dari kalangan selebriti merupakan potret gambaran tersebut. Sosok mereka identik dengan dunia keartisan. Marissa Haque adalah figur artis perempuan yang dilahirkan dari dunia perfilman era 80-an. Sementara, Angelina lebih dikenal sebelumnya sebagai putri Indonesia, dengan gelar ratu kontes kecantikan. Karier di politik tidak diawali dengan *track record* politik. Kandidat politik yang tidak memiliki jejak politik kuat diuntungkan oleh mekanisme Pemilu langsung pertama yang dilakukan berdasarkan sistem semi distrik. Hal itu terjadi karena tidak hanya nama wakil rakyat yang ditulis di kertas suara, namun juga mulai dipampangkan foto-foto mereka. Dalam Pemilu 2004, banyak selebriti yang masuk ke kancah politik, menggunakan popularitasnya untuk mengumpulkan suaranya. Para kompetitor politisi lainnya yang tidak dikenal rakyat tiba-tiba mendapat saingan hebat dengan munculnya wajah-wajah para politisi selebriti ini karena wajah mereka sering tampil di media, lebih banyak dikenal sehingga lebih populer di mata para calon pemilihnya.

Beberapa selebriti perempuan telah lolos menjadi anggota DPR di Senayan seperti Marrisa Haque wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Angelina Sondakh, wakil dari Partai Demokrat, Nurul Arifin wakil dari Partai Golongan Karya, Rieke Dyah Pitaloka wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tere wakil dari Partai Amanat Nasional, Rachel Maryam wakil dari Partai Gerindra.

Fenomena terpilihnya selebriti perempuan ke panggung politik baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya yang demokratis, memperlihatkan kekuatan selebriti sudah mampu menggalang massa dan dipergunakan untuk

menjaring pemilih bagi partai politik. Selebriti dijadikan produk politik atau kandidat untuk ditawarkan bagi pasar pemilih melalui strategi-strategi *political marketing*. Posisi tawar yang besar bagi para artis untuk masuk dalam bursa politik menciptakan sebuah adagium “politik tidak selalu garang” namun bisa berubah sangat “cantik” dan seperti menghadirkan sebuah opera baru dengan pentas yang berbeda. Politik yang “cantik” ini semakin marak, tatkala artis perempuan yang jelas cantik hadir mengunjungi daerah-daerah untuk menyemarakkan kampanye masing-masing partainya.

Mengapa peran artis perempuan dalam aktifitas politik di negeri ini menjadi sedemikian penting? Pertanyaan ini harus dijawab dengan mengedepankan sejarah kesadaran negara demokrasi yang adil membagi peran laki-laki dan perempuan dalam mengonstruksikan keadilan bagi peran perempuan dalam berpolitik. Perempuan sebagai elemen *civil society* memiliki tempat yang khusus dalam meletakkan dirinya untuk mendorong demokratisasi dan melakukan upaya penyadaran kepada rakyat bahwa mereka punya hak untuk didengar oleh negara, terkait dengan berbagai kepentingan mendasar mereka yang dituangkan dalam berbagai kebijakan politik negara. Perempuan turut ambil bagian selaku pengawas dalam setiap pengambilan kebijakan yang dibuat oleh lembaga politik negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Situasi di atas mengacu pada konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women - CEDAW*) yang disahkan oleh Dewan Umum PBB pada tahun 1979. Dua puluh tahun sejak ditandatanganinya konvensi itu, lebih dari 170 negara telah meratifikasinya. Konvensi itu dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan membuka akses dan peluang yang sama di arena politik dan kehidupan publik, termasuk hak memberi suara dan mencalonkan diri. Pemerintah telah bertekad untuk menempuh semua langkah yang diperlukan, termasuk legislasi dan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara, sehingga kaum perempuan nanti dapat menikmati seluruh hak dan ke-

merdekaan asasi mereka. Akan tetapi masih banyak negara yang belum menerapkan langkah-langkah di atas (www.komunitasdemokrasi.com, diunduh 21 September 2008).

CEDAW diratifikasi pada tahun 1984. Pemerintah Habibie kemudian meratifikasi Protokol Opsi yang merupakan bagian dari Konvensi Perempuan. Belakangan ini pemerintah Indonesia bahkan telah mengambil beberapa langkah untuk melakukan berbagai tindakan yang ditujukan untuk menyempurnakan kebijakan yang menyangkut jender, terutama masalah *gender mainstreaming*, yang merupakan sebuah strategi penting yang termuat dalam Platform Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action*). Keputusan Pre-siden Nomor 9/2000 berisi arahan kepada semua sektor pemerintahan Indonesia untuk menerapkan *gender mainstreaming* ini. Namun terlepas dari berbagai ratifikasi di atas, banyak pihak mengkritik pemerintahan sekarang yang belum juga mengeluarkan produk hukum baru atau merevisi undang-undang untuk memenuhi seluruh persyaratan konvensi tersebut (www.komunitasdemokrasi.com, diunduh 21 September 2008).

Sepanjang tahun 2001, perdebatan tentang representasi dan partisipasi politik perempuan semakin meningkat dan mendominasi agenda politik, berkat gigihnya organisasi-organisasi dan para aktivis masyarakat madani yang vokal menyuarakan isu ini. Salah satu isu terpenting yang mereka serukan adalah penerapan kuota tiga puluh persen bagi perempuan dalam proses pemilu. Perdebatan yang terus berlanjut dan terkadang menimbulkan kontroversi seputar jender dan demokrasi itu diakibatkan oleh tiga faktor dari masa lalu Indonesia. Faktor pertama adalah kenyataan historis dan berkelanjutan tentang rendahnya representasi perempuan Indonesia di semua tingkat pengambilan keputusan. Di parlemen nasional, perwakilan perempuan hanya 9.2 persen dari total anggota parlemen, jauh lebih rendah dari ‘rekor’ periode sebelumnya, yakni 12.5 persen (www.kompas.com, diunduh 15 September 2008).

Faktor ke dua berkaitan dengan reformasi politik yang sedang bergulir. Transisi menuju kehidupan politik yang demokratis telah memperlebar peluang bagi perempuan dan sektor-sektor masyarakat lainnya untuk mengekspresi-

kan pandangan mereka serta merumuskan dan menyuarkan tuntutan mereka tentang kesadaran dan kepekaan jender yang lebih besar di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, legislasi, dan politik pemilu. Sedangkan faktor ke tiga, berhubungan dengan krisis ekonomi tahun 1997 yang menyulut maraknya tuntutan pada representasi perempuan di semua tingkatan dan seluruh aspek kehidupan politik. Krisis itu telah memperburuk kondisi hidup kaum perempuan, sehingga mendorong mereka bangkit menyuarkan kebutuhan mereka, sekaligus mempertahankan hak-haknya. Semua faktor di atas telah menciptakan suatu atmosfer di mana seluruh organisasi masyarakat madani, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis, politisi dan badan-badan internasional bisa bersuara dan secara bersama-sama mempengaruhi wacana dan arah kebijakan pemerintah menyangkut keterlibatan perempuan Indonesia di sektor publik.

Ironisnya semua kerja keras yang sudah disepakati bahkan menjadi garis kebijakan tersebut terbantahkan oleh kenyataan di lapangan. Berbagai pernyataan menyudutkan peran perempuan utamanya bagi mereka selebriti yang terjun berpolitik. Kutipan berita di bawah ini mempertegas wacana artis perempuan sekedar menjadi pengumpul suara (*vote getter*) untuk mendongkrak imej partai politik tertentu. Berikut kutipan tertulis dari berita *online*, yang mengukuhkan stereotip artis perempuan menjadi sekedar *vote getter* dalam suatu partai politik.

“Lembaga kajian *The Indonesian Institute* (TII) berpendapat, perekrutan artis-artis ke partai politik masih efektif sebagai pengumpul suara (*vote getter*) dalam Pemilu legislatif tahun 2009, karena mereka dinilai bisa menaikkan citra Parpol. Tapi untuk jabatan eksekutif, seperti bupati, walikota dan gubernur, apalagi presiden, masih sulit bagi masyarakat untuk berspekulasi dengan memilih artis, kata Direktur Eksekutif TII, Jeffrey Geovanie. Namun ia memberikan kekecualian bagi artis yang populer dan memiliki konsistensi yang panjang di dunia hiburan, misalnya artis senior yang populer dan konsisten di dunia hiburan, seperti halnya Ronald Reagan di AS, tentu punya peluang untuk dipilih di jabatan eksekutif. Menggunakan artis sebagai *vote*

getter sebenarnya bukan hal yang baru di pentas politik Indonesia. Misalnya di era Orde Baru, artis senior sudah ditarik ke partai politik. Berdasarkan catatan, pada Pemilu 2004, artis-artis juga dijadikan sebagai pengumpul suara dengan mengajukannya sebagai calon anggota dewan, seperti di Partai Demokrat, Golkar, PAN dan PDIP” (www.harianpelita.com, 15 Maret 2008).

Pernyataan yang dikutip media tersebut disadari atau tidak telah merepresentasikan sebuah wacana. Dalam hal ini teks-teks berita sebagai bagian industri yang memiliki kebijakan, aturan, visi, dan misi yang terangkum dalam sebuah ideologi media. Seringkali masyarakat kurang menyadari sebuah keberlangsungan struktur, rasionalitas beserta ideologi laten yang termuat dalam teks mampu menciptakan label-label baru bagi kehidupan setiap manusia. Pernyataan dari kutipan berita tersebut adalah refleksi teks yang meneguhkan stereotipe artis perempuan sebagai “pengumpul suara” dalam partai politik. Mengingat kutipan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh lembaga kajian *The Indonesian Institute* (TII), lembaga yang notabene sering melakukan riset di lapangan terkait fenomena sosial politik di Indonesia, maka berbagai ketimpangan yang menyudutkan artis perempuan ini cenderung mengarah pada pembunuhan karakter (*character assassination*) mereka yang berprofesi sebagai artis, dan terjun sebagai selebriti politisi. Mengutip ungkapan Kate Millet (1970: 201) bahwa dunia politik melakukan sebuah praktek “politik seksual” terhadap perempuan dalam hal ini artis perempuan berpolitisi. Persoalan ini menarik untuk dibongkar dan menjadi perhatian masyarakat yang hidup dalam konteks demokrasi untuk mengetahui sejauh mana *impression management* dipertukarkan dalam komunikasi politik dan peran artis perempuan berpolitik dalam praktek politik di Indonesia.

Bila membicarakan mengenai gender maka dekat dengan diskusi yang diidentikkan oleh karakter laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kontemporer. Secara khusus, akan membedah konstruksi sosial subyek yang dijadikan politik seksual dalam masyarakat kontemporer. Kajian mengenai pemahaman politik seksual dalam sebuah wacana keseimbangan dalam partisi-

pasi politik menjadi ranah ideologi yang dapat ditarik ke arah hegemoni peran atas laki-laki terhadap perempuan.

Dalam bidang teori dan politik dengan menautkan kajian feminisme, maka terdapat berbagai perspektif yang saling bersaing. Secara umum feminisme sebagai poros reduksi terhadap organisasi sosial dapat ditempatkan pada subordinasi peran perempuan atas laki-laki. Barker (2004 :25) menyatakan bahwa feminisme, pada intinya menaruh perhatian pada seks sebagai prinsip pengatur kehidupan sosial di mana relasi gender sepenuhnya dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Subordinasi perempuan terbukti ada di berbagai praktik dan institusi sosial, artinya kekuasaan laki-laki dan subordinasi perempuan bersifat struktural. Feminisme yang mengarah pada persamaan dan kesetaraan kehidupan politik merupakan gerakan feminisme liberal dan sosial.

Praktik mengenai persaingan perspektif antara relasi gender ini hendaknya tarik pada persoalan budaya patriarki. Kritik terhadap konsep patriarki merujuk Barker (2004:26) adalah terletak pada kategori perempuan yang tidak terbedakan. Jadi, semua perempuan dipandang memiliki kesamaan mendasar yang bertentangan dengan semua laki-laki. Konsep Barker adalah sebuah perspektif yang *inheren* dengan kultur di masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat sebuah praktik yang menyubordinasi peran perempuan dalam praktik bermasyarakat. Sebagai contoh seorang artis selebritis perempuan yang menjadi wakil rakyat selalu diasosiasikan dengan cantik dan mampu menghibur massa, dan meniadakan unsur kompetensi personal. Bagaimana konstruksi ini terbangun tidak lepas dari peran media dalam penetrasi pesan media yang mengemas dari proses produksi teks menjadi sedemikian rupa dengan tidak lepas dari unsur ideologi media yang menciptakan subordinasi peran laki-laki dan perempuan. Serangkaian proses tersebut yang dimaknai oleh massa atau khalayak pembaca sehingga menciptakan *stereotype*. Pencitraan peran tersebut menjadi sebuah bagian dari komoditas industri media yang menjadi sebuah konstruksi kognisi khalayak, bahwa artis perempuan berpolitik memang demikian adanya.

Penggunaan konsep Gramscian terbukti memiliki pengaruh yang *inheren* karena tidak

semata-mata labelisasi melekat dengan sendirinya dan menciptakan polarisasi makna di benak khalayak, namun lebih jauh bahwa media memiliki serangkaian ideologi yang terefleksi dalam hasil-hasil pesan medianya. Akibatnya, Gramsci menjadikan perjuangan ideologis dan konflik di dalam masyarakat sipil sebagai arena sentral dalam politik budaya, dengan analisis hegemonik tentang cara perolehan keseimbangan kekuatan yang relevan.

Dalam analisis Gramscian mengutip pada Barker (2004:62) yang memaparkan bahwa ideologi dipahami sebagai ide, makna, dan praktik yang kendati mereka mengklaim sebagai kebenaran universal, merupakan peta makna yang mendukung kekuasaan sosial tertentu. Ideologi tidak dapat dipisahkan dari aktifitas praktik kehidupan, namun posisinya adalah fenomena material yang berakar pada kondisi sehari-hari. Ideologi menyediakan aturan perilaku praktis dan tuntunan moral yang sepadan dengan agama yang secara sekuler dipahami sebagai kesatuan keyakinan antara konsepsi dunia dan tindakan.

Hegemoni dapat dipahami dalam konteks strategi di mana pandangan dunia dan kekuasaan kelompok sosial panutan (apakah mereka berupa kelas, seks, etnik, atau nasionalitas) dipelihara dalam kultur masyarakat. Hegemoni terus-menerus diciptakan dan dimenangkan, maka membuka kemungkinan adanya tantangan di atasnya, yaitu penciptaan kontra hegemoni bagi kelas subordinat. Hasil penelitian ini menemukan ketimpangan kelas yang menempatkan hak-hak kesetaraan dalam berpolitik melalui penginferioran perempuan sebagai label pencitraan dalam aktifitas politik. Keberadaan perempuan selaku artis telah dikomodifikasi menjadi sekedar strategi *political marketing* bagi sebagian partai politik untuk mampu menggalang massa dan mengumpulkan suara. Tidak dapat disangkal bahwa praktik yang berlangsung sejak Orde Baru telah menjadi sebuah stereotip yang menciptakan labelisasi terhadap peran artis perempuan yang menjadi politisi sebagai “*vote getter*”.

Sunarto (2000:36) mendefinisikan perspektif feminisme liberal sebagai penekanan terjadinya subordinasi kaum wanita di masyarakat yang disebabkan oleh adanya hambatan hukum dan adat yang menghalangi wanita untuk masuk

ke dalam lingkungan publik. Perspektif liberal melihat bahwa perbedaan biologis antara kaum wanita dan pria sebagai sebab terjadinya perilaku yang subordinatif tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat beranggapan, karena kondisi alamiahnya, kaum wanita kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan kaum pria. Kaum wanita dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik.

Penyadaran pada pemikiran feminisme liberal memiliki relevansi dengan perjuangan para artis perempuan yang terlibat secara aktif dalam politik praktis. Stigma perempuan artis masih identik dengan politik seksual yang memberikan disparitas nyata bahwa posisi mereka diindetikkan sebagai pengumpul suara partai saja. Popularitas menjadi studi yang memiliki kajian interdisipliner dengan bidang marketing. Logika ini paralel dengan sosok artis yang dianggap sebagai alat pemasaran pada konstituen partai. Artis tidak dapat dilepaskan dari konstruksi “*value*” yang identik dengan simbol-simbol pencitraan.

Guna memasarkan citra yang merujuk pada sosok, sebelumnya harus memiliki citra yang ingin dimunculkan, lalu mengidentifikasi sasaran yang dituju, merumuskan *positioning* yang tepat untuk mencerminkan citra serta merancang pesan dan media kampanye yang tepat. Hal ini menegaskan bahwa citra personal mempunyai arti sangat penting dalam Pemilu. Berikut ini peringkat citra personal dalam Pemilu yang berlangsung di Eropa dan Amerika.

Secara konseptual penelitian ini berusaha merumuskan definisi selebriti. Selebriti dalam *Un-*

derstanding Celebrity mengarah pada pemahaman orang yang banyak dikenal. Graeme Turner (2004 : 20-21) menyebutkan, selebriti adalah orang asing yang akrab dan menembus dalam kehidupan pribadi orang-orang lainnya. Kehidupan sehari-hari selebriti biasanya lebih banyak sisi menarik dan kontroversinya dibandingkan kemampuan profesional dan pencapaian prestasinya. Selebriti merupakan produk dalam sejumlah budaya, di mana sejumlah unsur berinteraksi di dalamnya meliputi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Pertarungan relasi peran ini, menyebabkan seringkali selebriti dijadikan komoditas melalui proses komodifikasi dan menjadi bagian dari objek konsumsi.

Penelitian ini dilandasi adanya beberapa permasalahan mendasar mengenai maraknya sosok artis perempuan dalam dunia politik di Indonesia, yang cenderung berlabel sebagai penjaring suara. Popularitas digunakan sebagai komoditas politik sehingga memunculkan stereotip perempuan sekedar “pengumpul suara” dalam lingkup partai. Dua aspek penting dalam penelitian ini adalah menyajikan bagaimana pola penggambaran yang dilakukan oleh media cetak dalam hal ini Tempo terkait hubungannya dengan wacana stereotip artis perempuan sebagai “pengumpul suara?”. Selanjutnya, tulisan ini memaparkan bagaimana proses sosiokultural yang terdapat dalam struktur masyarakat dalam rangka membentuk realita yang muncul di media.

Pharr (1996:24-36), mengemukakan adanya empat pandangan yang saling berlawanan, yaitu; *pertama* media sebagai penonton (*spectator*); *kedua*, sebagai penjaga (*watchdog*); *ketiga*, sebagai pelayan (*servant*); dan *keempat*, sebagai penipu (*trickster*). Pharr mendudukan media sebagai penipu, sebuah kosa kata yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, penipu merupakan partisipan aktif dalam proses politik. Akibat utama dari peran ini sebagai pembangun komunitas. Stereotip penipu kemudian berubah menjadi kosa kata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang penuh dengan kebaikan. Pharr menguraikan bahwa perilaku media secara frekuentatif menampilkan sisi yang ambigu, hipokrit, dan inkonsisten. Label menipu dalam konteks ini, meski dapat dipandang sebagai positif, tetapi juga mengandung sisi yang bersifat membahayakan sekaligus de-

Tabel 1. Faktor Peringkat Peluang Kemenangan Kandidat di Pemilu Eropa

1. *Personality/Image*
2. Kemampuan berkomunikasi melalui media
3. Penampilan di media (khususnya TV)
4. Pesan sentral kampanye
5. Kualitas kepemimpinan
6. Kompetensi isu
7. Kemampuan retorika/bicara
8. Pernyataan dukungan partai
9. Penampilan personal
10. Profesionalitas Konsultan Media dan TV11. Pengalaman Politik

Sumber : Plasser, Fritz (1999:89)

struktif. Pharr berargumen bahwa media penipu tidak mewakili kepentingan satu kelompok tertentu. Deskripsi Pharr terhadap realitas media di Asia Tenggara yang secara frekuentatif terjebak dalam berbagai kepentingan. Tipuan ini tidak datang dari kurangnya loyalitas, namun dari loyalitas yang berlipat, pluralitas dalam kewajiban, dan beragamnya *stakeholder* yang sejalan dengan kemauan pemilik medianya. Sangat jelas bahwa *stakeholder* menghasilkan kekuatan sekaligus kelemahan.

Pemikiran Pharr (1996: 24-36) berangkat dari fenomena mayoritas analisis media dari barat cenderung melihat hubungan partisan dalam konteks hubungan formal dan informal antara organisasi media dan partai politik. Sebaliknya dalam konteks Asia Tenggara, definisi ini belumlah memadai. Dikarenakan hubungan partisan harus dipahami sebagai rangkaian keseluruhan dari hubungan antarpraktisi, secara paralel dengan dunia media dan politik. Literatur dari negara berkembang menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, di mana media digunakan sebagai alat propaganda negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Fairclough. Analisis wacana ini mempelajari bagaimana kekuasaan disalahgunakan atau bagaimana dominasi serta ketidakadilan dijalankan dan direproduksi melalui teks (*dalam praktiknya teks di sini bisa diartikan sebagai berita, puisi, lagu, video*). Termasuk di dalamnya akan dipelajari pula bagaimana produksi wacana berlangsung dan relasi kuasa apa saja yang ada di belakangnya.

Analisis wacana kritis yang merujuk pada pemikiran Fairclough mengombinasikan tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Bahasa sebagai manifest dari teks dilihat sebagai proses dialektika dengan struktur sosial sehingga analisis dipusatkan pada bagaimana bahasa terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu. Analisis wacana kritis pada dasarnya berpijak pada gagasan Marx yang memandang masyarakat sebagai sistem kelas. Masyarakat dipandang sebagai sebuah dominasi dan media menjadi bagian dari sistem dominasi

tersebut. Media diyakini (atau lebih tepatnya dicurigai) sebagai alat dominasi dari kelompok dominan terhadap kelompok lain. Teknik Fairclough meliputi tahapan analisis wacana yang digunakan pada level teks secara keseluruhan beserta sejarah dan konteks teks ketika dihadirkan. Penelaahan teks dilakukan dari level wacana sampai ke level yang mempengaruhi naskah tersebut. Pada umumnya dikategorikan menjadi tiga level meliputi level mikro, meso, dan makro. Analisis jenjang teks dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar analisis *framing* untuk studi isi media. Menurut Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Framing yang berbeda menghasilkan berita yang berbeda pula apabila wartawan memiliki *frame* yang tidak sepaham dalam memandang suatu peristiwa dan menuliskan reportasenya kedalam sebuah berita.

Objek analisis dalam penelitian ini adalah teks berita pada rubrik Pokok dan Tokoh majalah Tempo. Digunakannya teks berita dalam penelitian ini karena data teks merupakan cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Berita yang ditentukan merupakan hasil pemilihan secara purposif berdasarkan isu yang sedang berkembang. Artikel yang dipilih berdasar indikator majalah Tempo yang terbit bulan Desember 2007-Oktober 2008. Rubrik berita Pokok dan Tokoh dengan objek berita selebriti perempuan. Artikel terpilih diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2007, yang memuat pengunduran diri artis perempuan bernama Rieke Diah Pitaloka (RDP) sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan artikel berjudul "Rachel Maryam (RM) Susah Bertemu Idola" yang diterbitkan pada 20 Oktober 2008. Peristiwa tersebut merupakan momentum untuk mencuatkan kembali isu tentang selebriti perempuan sebagai komoditas politik yang makin marak saat ini, terutama menjelang Pemilihan Umum 2009. Intertekstualitas penelitian dilakukan dengan membandingkan antara isi teks dalam artikel terpilih dengan isi teks liputan artis dari media lain yang memiliki porsi pemberitaan satu tipe dengan objek yang dikaji.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip pertama dari sebuah wacana dipahami sebagai suatu tindakan, yang mengasosiasikan wacana sebagai sebuah bentuk interaksi. Wartawan dalam tindakannya ketika berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, terutama publik dalam hal ini pembaca majalah Tempo. Hal ini tidak lepas karena wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi pembaca, menciptakan *image* terhadap sosok yang ditulis, mendebat, membujuk, bersikap reaktif dan sebagainya. Motif seseorang menulis tidak lepas dari sebuah maksud pada saat tertentu. Wartawan menulis artis perempuan yang berpolitisi, maka ada sebuah intensifitas terhadap bahasa yang digunakan sebagai alat untuk membangun praktik-praktik pencitraan terhadap sosok selebriti tersebut. Ketika sebuah teks dikonsumsi akan mampu mengarahkan konstruksi pembaca dalam pencitraan sosok yang diliput tersebut.

Naskah berita dipandang sebagai sebuah hasil produksi, dimengerti substansinya, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu dimana peran artis perempuan diposisikan menjadi kelompok minoritas dan praktik politik praktis. Analisis terhadap teks juga melibatkan konteks dari komunikasi, dalam hal ini siapa mengomunikasikan dengan siapa, mengapa dalam jenis khalayak dan situasi seperti apa, melalui media apa. Bahasa menjadi kendali utama namun memaknai keseluruhan konteks yang terlibat.

Terdapat elemen lain yang turut dipertimbangkan dalam analisis teks kritis ini, yaitu elemen kekuasaan. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks baik berupa gambar maupun foto, diposisikan sebagai sesuatu yang tidak alamiah, tidak wajar dan tidak memiliki netralitas, namun cenderung membangun sebuah pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan menjadi salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Dalam kasus ini, kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dalam praktiknya mengecilkan peran perempuan terkait keterampilan dan kompetensi politik, menjadi sekedar “pemanis” arena politik yang mampu menarik massa atau konstituen sebuah partai politik.

Penelitian ini berusaha menempatkan sebuah wacana dalam bentuk teks pada konteks sosial tertentu yang menyertai lahirnya teks tersebut. Peneliti menganalisis memerlukan tinjauan untuk memahami mengapa wacana tersebut berkembang dan dikembangkan sedemikian rupa. Apa yang menjadi pertimbangan bagi wartawan memilih bahasa untuk menciptakan setting yang melekat dalam teks tersebut.

Konsep sentral yang melekat dalam wacana kritis adalah ideologi. Teks yang dianalisis merupakan bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari sebuah ideologi tertentu. Salah satu strategi peneliti untuk memahami adalah dengan menciptakan kesadaran selaku pembaca ketika menginterpretasikan sebuah teks bahwa sebuah ideologi tidak selalu bisa *taken for granted*. Menurut Van Dijk (1997), untuk menjelaskan situasi ini sering diistilahkan sebagai konsep kesadaran palsu. Praktik ideologi patriarki memanipulasi kelompok perempuan melalui kontrol media.

Robert Entman Berasumsi bahwa *framing* digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas media. *Framing* memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pemuat teks. *Framing* dibagi dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu (Entman, 1993:53). Entman membagi konsep *framing* ke dalam empat item, yang terdiri dari pemberian definisi (*define problem*), penjelasan (*diagnose causes*), Evaluasi (*make moral judgement*) dan Rekomendasi (*treatment recommendation*) dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Bahasa dapat dikaji secara internal dan eksternal. Kajian secara internal menurut Agustin dan Abdul Chaer (1994:1) adalah pengkajian yang hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa maka hasil kajian hanya berkaitan dengan penggunaan-penggunaan bahasa tersebut, tanpa terkait dengan persoalan lain di luar bahasa.

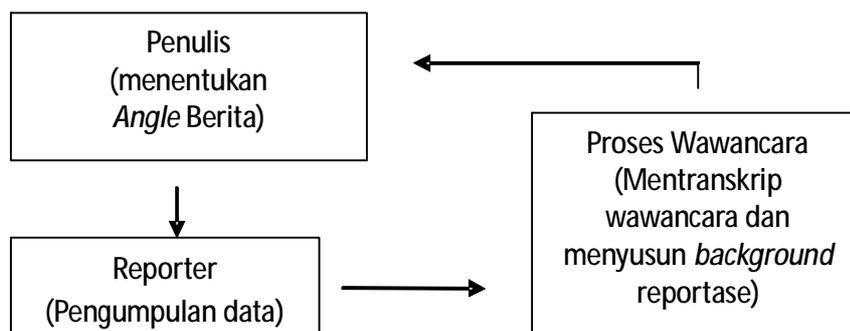
Bahasa adalah alat komunikasi verbal dan non verbal yang paling banyak dipergunakan ma-

nusia dalam proses penyampaian pesan kepada pihak lain. Manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan bahasa untuk bersosialisasi dengan sesama dunianya. Ia adalah pengguna bahasa yang sekaligus memahami makna bahasa tersebut dan menciptakannya menurut masyarakat. Suatu bahasa mengandung makna, maka bahasa itu telah bekerja karena maksud dari tindak komunikasi tercapai. Penciptaan dan penahanan makna bahasa yang dipakai berbeda-beda. Hal ini disebabkan bahasa adalah produk sosial, bersifat dinamis, dapat berubah sebagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Penciptaan itu sangat tergantung pada tempat, waktu, konteks situasi, dan siapa yang dominan, sehingga individu, kelompok, dan masyarakat tertentu sangat menentukan proses ini. Dalam bukunya, Karen Etkinson (1993:403-404), menyatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari struktur kehidupan manusia setiap hari. Terdapat kemungkinan manusia mampu melepaskan diri dari proses komunikasi. Dalam proses ini terjadi pertukaran makna sehingga membentuk apa yang dinamakan saling berbagi makna bersama antarkedua belah pihak. Dalam proses tersebut sangat memungkinkan munculnya pihak superior dan menentukan proses yang merugikan pihak yang inferior. Situasi yang demikian telah berkembang seiring dengan perkembangan gender yang meyakini bahwa bahasa dapat menghasilkan "*linguistik sexius*", yang merupakan hal umum atau lazim terjadi. Proses ini juga karena adanya usaha untuk melindungi pihak dan golongan tertentu, kekuasaan dan bermacam-macam kepentingan lainnya. Sebagai contoh melanggengkan struktur ideologi media.

Perbedaan bahasa dalam melambangkan realitas sosial semakin jelas pada waktu meng-

gambarkan dan proses labelisasi realitas atas diri perempuan. Pendekatan ini digunakan sebagai strategi dalam interaksi sehari-hari. Bahasa tidak hanya dipercaya sebagai alat komunikasi dalam penyampaian pesan kepada orang lain. Bahasa sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan kompleksitas makna dalam sistem komunikasi. Perbedaan pandangan dapat saja terjadi karena pada dasarnya mereka percaya bahwa perempuan memang berbeda tugas dan tanggung jawab dengan laki-laki.

Wartawan Tempo mengatakan bahwa dalam artikel Pokok dan Tokoh, topik ditentukan pada saat rapat redaksi, kemudian diputuskan mengangkat topik "Rieke Dyah Pitaloka (RDP) Pamit pada Gus Dur (GD)". Hal tersebut didasarkan pada semakin maraknya artis yang direkrut oleh partai politik menjelang Pemilihan Umum 2009. Pilihan artis tidak jatuh pada Nurul Arifin, Angelina Sondakh atau Marissa Haque dikarenakan terdengar kabar seputar Rieke direkrut oleh PDI Perjuangan. Sementara publik mengetahui bahwa sosok RDP telah cukup lama berkarier di partai politik namun belum juga berhasil hingga ke senayan. Karier politik Rieke sangat berliku bila dibandingkan Angelina Sondakh sebagai mantan Putri Indonesia yang jauh lebih cepat karena memiliki kendaraan partai yang terbilang kuat dan fenomenal. Sama halnya dengan Nurul Arifin yang berkali-kali mengalami kegagalan di partai Golongan Karya. Kegagalan keduanya ditengarai nomor kursi mereka yang identik dengan nomor sepatu. Artinya posisi mereka tidak memungkinkan untuk menduduki kursi parlemen karena nomor kursi mereka tidak memiliki perolehan suara yang cukup besar di kantong-kantong pemilihan. Sementara liputan terkait Rachel Mar-



Gambar 1. Alur Penulisan Berita di Redaksi Majalah Tempo

yam dilakukan dengan asumsi artis ini termasuk pemain baru di arena politik. Liputan Rachel di-konstruksikan penulis tanpa *angle* politik namun lebih menunjuk pada sisi keartisannya. Berikut temuan di level produksi yang berusaha dipaparkan untuk mengetahui bagaimana proses teks tercipta. Alur penulisan berita dalam redaksi Majalah Tempo dapat dilihat pada gambar 1.

Tugas Reporter di Tempo adalah mengumpulkan data, *angle* setiap berita ditentukan oleh penulis yang membuat penugasan dan nanti akan menulis berita. Tugas reporter adalah pergi ke lapangan, mewawancarai sumber dan menyerahkan transkrip wawancara plus *background* reportase kepada para penulis. Kebanyakan pembicara menekankan tentang pentingnya tugas reporter dalam mendapatkan informasi *background*. Menurut Kepala Biro Jakarta, Ahmad Taufik, model semacam ini hanya dimiliki oleh Tempo dan tidak dimiliki oleh media lain. Pos liputan para reporter juga dirotasi secara berkala, dengan maksud agar mereka menguasai berbagai bidang. Bisa diibaratkan penulis Tempo meminjam mata reporter di lapangan. Menariknya, liputan rubrik Pokok dan Tokoh seringkali dibidangi oleh wartawan perempuan, di kalangan wartawan, rubrik ini memiliki nilai yang kurang prestisius. Menurut Silaban wartawan Tempo yang membidangi rubrik Pokok dan Tokoh menegaskan bahwa rubrik ini lebih pada berita selingan dan tidak seserius di liputan politik lainnya.

Analisis Historis Tempo

Merujuk pada perspektif CDA Fairclough (1998), diperlukan perspektif historis di level makro. Perspektif historis dalam paradigma kritis diasumsikan sebagai penanda keabsahan data yang relevan terhadap strategi kritis yang dibangun dari suatu penelitian. Sejarah perjalanan Tempo yang dimulai pada tahun 1971 oleh Goenawan Muhammad, Bur Rasuanto dan Usamah sementara Fikri Jufri sebelumnya adalah penulis harian Pedoman yang diberedel setelah insiden Malari. Sembilan pendiri lainnya, para staf redaksi sebelumnya terlibat di jurnal sastra. Pendiri majalah Tempo adalah "Angkatan 66", mahasiswa dan aktifis yang bersama-sama dengan militer menga-

khiri kekuasaan Soekarno (Teeuw dalam Martinus dalam Steele, 2007:41-46). Tempo tumbuh kuat dan makmur pada era pembangunan ekonomi Soeharto yang melonjak oleh kenaikan harga minyak pada pertengahan tahun 1970-an. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai "Macan Asia". Orde Baru menguat pada pertengahan 1980-an, bersamaan dengan itu sejumlah media yang bersuara keras di bredel oleh pemerintah dan dicabut ijin usaha penerbitannya.

Meskipun Tempo pernah mengalami pembredelan tahun 1982, Tempo selalu berusaha untuk menghindar, "menentang" kekuasaan. Ini mungkin terjadi karena bahasa Tempo yang khas, gaya majalah yang oleh Benedict Anderson disebut sebagai "penuh kesantunan" (*mannered knowingsness*). Pengamat lain mengatakan Tempo adalah "kolaborator struktural", media yang diijinkan terbit karena kehadirannya bisa membuat rezim dengan bangga mengatakan bahwa mereka memelihara keterbukaan (Steele, 2007:xiii)

Merujuk pada Steele, meski memiliki hubungan yang ambigu dengan Orde Baru Tempo adalah institusi yang independen, organisasi non pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Dalam beberapa hal para editor menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Orde Baru, bagaimanapun mereka mampu menawarkan perspektif yang independen tentang bangsa dan masyarakat Indonesia dengan cara yang halus dan tepat. Meski tingkat keterbacaan Tempo relatif kecil (sirkulasi tiap minggunya tidak pernah lebih besar dari 190 ribu) tetap memiliki pengaruh cukup besar.

Tempo merupakan ruang bagi para penulis untuk dapat mempertukarkan ide mereka dengan relatif terbuka. Bagi orang kebanyakan, Tempo adalah simbol status kelas menengah, yang melahirkan indikator bagi pembacanya sebagai pembaca yang berkelas. Salah satu alasannya adalah upaya Tempo untuk mendidik reporter yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam sebuah grup, dengan serangkaian tes (psikotes, presentasi, seminar, menulis dan riset). Dalam perekrutan, Tempo cenderung merekrut anak muda yang tidak memiliki pengalaman jurnalistik apa pun. Sebagai contoh Pemimpin Redaksi, Bambang Harimurti adalah sarjana Teknik, Wakil Pimpinan Redaksi Thoriq Hadad dari jurusan pertanian, dan Re-

Tabel 2. Presentase Pembaca TEMPO

Tahun	Persentase Pembaca Laki-laki Majalah Tempo
1986	76 %
1989	86.34%
1991	86.34%
1993	86.43%
1994	84.48%
2002	68%

daktur Eksekutif Malela S. Mahargasarie berasal dari jurusan Seni dan Desain.

Analisis Konsumsi Teks

Merujuk pada riset Steele (2007), bahwa profil pembaca majalah Tempo diyakini pada umumnya berasal dari kelas menengah. Sejak 1981, bagian iklan Tempo menyebutkan hasil survei yang menyatakan bahwa mayoritas pembaca mereka berada pada posisi “pemilik” atau “manajemen” di berbagai sektor publik atau swasta dan menikmati penghasilan tingkat tinggi. Hasil survei ini berbeda-beda tiap persentase dan kategorinya dari tahun ke tahun, tapi yang signifikan adalah sepanjang 1980-an Tempo meneguhkan dirinya sebagai alat para pengiklan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi, pejabat, dan pembuat keputusan. Menjelang tahun 1993, dokumen pemasaran Tempo secara eksplisit menyebutkan kebijakan editorial Tempo disesuaikan dengan permintaan kelas menengah borjuis Indonesia.

Aspek lain dari Tempo adalah orientasinya terhadap pembaca laki-laki. Hal ini berdasar pada data pemasaran Tempo yang menunjukkan pe-

riode sebagian besar pembaca Tempo adalah laki-laki. Tabel 2 menunjukkan angka tersebut;

Melalui penelusuran data konsumen dan segmentasi media, pihak manajemen Tempo sejak tahun 1981 lebih menekankan segmen pada pembaca laki-laki. Sementara kaum perempuan kebanyakan pola konsumsinya mengikuti suami. Perhitungan di Tempo menunjukkan angka pembaca perempuan hanya berkisar 1.2 persen atau lia persen yang benar-benar membeli Tempo sendiri tanpa mengikuti pasangannya. Karena pola konsumsi ini maka Tempo lebih identik dengan majalah laki-laki. Salah satu alasan kuatnya adalah berita-berita yang ditampilkan kebanyakan ditulis dari sudut pandang laki-laki, perempuan dianggap jarang ingin membaca berita berat seputar politik.

Departemen iklan dan pemasaran Tempo menggambarkan bahwa pembaca ideal Tempo adalah laki-laki usia 26-40 tahun, dengan pengeluaran bulanan yang tinggi sehingga bisa dikategorikan dalam kelas A atau B, bila merujuk pada kategori Biro Pusat Statistik. Beberapa wartawan mengacu pada pengeluaran bulanan pembaca dan hampir semua menyebut pengeluaran ini berada di bawah rata-rata pengeluaran kelas A yaitu kisaran US\$ 600 perbulan.

Konsumsi Teks

Informan dalam level konsumsi teks adalah kelompok yang telah membaca artikel Pokok dan Tokoh edisi 3-9 Desember 2007. Pertimbangan kompetensi dan latar belakang pendidikan informan menjadi dasar untuk mengkaji konsep komoditas yang muncul di tingkat sosiokultural bagi pembaca rubrik Pokok dan Tokoh majalah Tempo. Terdapat rumusan utama dari dua informan

Tabel 3. Interpretasi Informan

Informan 1	Informan 2
Pemaknaan publik terhadap Stereotipe Artis sebagai komoditas Politik Setelah membaca Artikel “RDP Pamit pada GD”	Perempuan harus memilih partai politik yang tidak menempatkan kaum perempuan sebagai idola dan primadona, atau sekedar peraih suara (<i>vote getter</i>). Partai yang memasang selebriti harus dipertanyakan ulang integritas dan program kerjanya.
	Perempuan termarginalkan karena media mengkonstruksi artis RDP dan RM sebagai sosok yang terhegemoni, tertindas oleh kekuasaan pemilik partai. Sehingga merampas kebebasan kehidupan politiknya, namun sayangnya terdapat situasi yang tidak disadari oleh artis, seperti kasus RM yang jutu senang dikonstruksi demikian.

terkait Popularitas Perempuan sebagai Komoditas Politik (tabel 3).

Analisis Jenjang Sosio Kultural

Wartawan atau awak media memiliki sebuah perangkat etika dan kepekaan sosial terhadap sebuah peristiwa. Etika, moral dan keyakinan tertentu menjadi bagian yang integral dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Artinya media justru bisa berperan sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarluaskan kepada khalayak. Akibatnya pemberitaan terbentuk dengan sebuah distorsi akibat ideologi tertentu dari media. Kekuatan ideologi patriarki dalam Tempo sangat mengakar pada bentuk Feature liputan Pokok dan Tokoh. Dalam Artikel RDP Pamit pada GD” Perempuan tetap tersubordinasi oleh laki-laki, ketika karier politik RDP tidak berkembang, dia masih memperlihatkan sikap tersubordinasi dalam peran kesetaraan hak dan kewajiban berpolitik atas GD (namanya pada cara pamit RDP). Popularitasnya sebagai perempuan cenderung menyulitkan RDP untuk membuat sikap tegas mundur dari PKB karena unsur dominasi afeksi yang dirasakannya manakala popularitasnya didongkrak pula oleh PKB. Sementara dalam kasus RM, terjadi hal yang sebaliknya ketika RM justru menawarkan diri pada Gerindra, selebihnya dia menikmati peran sebagai pendatang baru dalam politik meskipun tidak memiliki basis pengalaman politik, RM tetap memperoleh posisi strategis di wilayah pemilihan Jawa Barat.

Telaah Artikel RDP Pamit pada GD Berdasarkan Analisis Teks Entman

Dalam Pembingkai Kategori I, peneliti menginterpretasikan pemahaman sempit atas konstruksi selebriti perempuan yang dikecilkan perannya dalam *political literacy* disebabkan faktor stereotip artis yang lebih menekankan popularitas, penampilan fisik (kecantikan) dan ketokohan peran dalam sinetron. RDP lebih dikenal sebagai Oneng dalam sinetron Komedi Situasi Bajaj Bajuri dibandingkan popularitasnya sebagai aktifis yang berpolitik di partai PKB.

Dalam Pembingkai Kategori II, jelas nampak terdapat benih-benih pemberontakan Jiwa RDP disebabkan ketidakadilan atas konstruksi stereotip artis sebagai komoditas politik. Dalam Pembingkai pada kategori III, peneliti menginterpretasikan konstruksi atas diri RDP yang dijadikan “pengumpul suara” (*vote getter*) bagi partai politik setelah sembilan tahun berpolitik tidak mengalami adanya perkembangan karier.

Telaah Artikel “RM Susah Bertemu Idola”, berdasarkan Analisis teks Entman

Dalam Pembingkai Kategori I, peneliti menginterpretasikan secara terbatas dalam bingkai RM Susah Bertemu Idola. Pertimbangan ini didasarkan pada beberapa fakta yang menunjukkan kuatnya stereotip artis politisi diliput tidak dalam sisi yang berimbang. Untuk itu yang ditonjolkan dalam artikel ini hanya seputar sisi keartisan figur RM, dan tidak menunjukkan bagaimana usaha RM melakukan strategi peningkatan kompetensi politiknya. Geliat keartisan masih menjadi isu utama bagi rubrik Pokok dan Tokoh majalah Tempo, meski objek liputannya telah menasbihkan diri sebagai anggota partai politik. Rubrik ini sekaligus menegaskan wacana peran artis dalam setiap partai politik tidak lebih dari sekedar aset komersial untuk menggalang massa.

Dalam Pembingkai Kategori II, peneliti justru tidak menemukan upaya figur RM mempromosikan perspektifnya tentang politik. Implikasi atas konsep hegemoni Gramsci berlaku bagi figur RM. Keterlibatan RM sebagai anggota partai dan upaya Gerindra memasang RM sebagai bagian iklan politik tidak lebih dari propaganda politik seksual, yang menempatkan RM sebagai komoditas setara label dalam partai. Sayangnya sikap *counter* RM ini tidak nampak dalam bingkai beritanya, justru RM memiliki spirit atas pembenaran motivasi awalnya untuk bertemu dengan tokoh yang dikaguminya sejak awal.

Dalam Pembingkai Kategori III, peneliti menginterpretasikan bahwa konstruksi RM sebagai kategori berita selingan yang tidak memiliki unsur nilai penting (*prominence*) dan kebaruan (*novelty*). Kebijakan redaksi menempatkan figur

RM telah meneguhkan asumsi bahwa artis tetap dikategorikan bukan politisi dalam arti yang sebenarnya. Penempatan *angle* dan perspektif dari penulis berita ini nampak dari alur dan pemilihan setting penampilan beritanya, seperti pemilihan pose foto tidak seserius figur politik lainnya, stilistik penulis sangat jauh dari upaya mengkonstruksi RM sebagai artis politisi.

Telaah Artikel Pokok dan Tokoh, Berdasarkan Analisis CDA Fairclough

Adapun dari level produksi teks, peneliti mendapatkan kesan bahwa tugas reporter tidak memiliki kewenangan lebih untuk menciptakan realitas personalnya, karena tugasnya adalah sekadar memberikan *background* reportase pada penulis. Realitas yang ditangkap oleh reporter bisa sangat bias ketika diterjemahkan dalam bentuk artikel oleh penulis karena hanya meminjam refleksi reporter saja. Dalam hal ini tugas reporter sarat dengan dominasi, reporter artikel ini kebetulan perempuan dan harus mengikuti kebijakan hasil rapat redaksi untuk menampilkan sosok perempuan yang teropresi dalam berpolitik. Struktur tempat bekerja pihak reporter yang sangat patriarkhi pun menjadi sebuah struktur dominasi yang melahirkan opresi-opresi ketidakberimbangan liputan (*un cover both side*) atas realitas perempuan. Sedangkan dari level konsumsi teks, terdapat persepsi yang mengkonstruksi bahwa angka Perhitungan internal di Tempo melalui wawancara dengan Silaban menunjukkan angka pembaca perempuan hanya berkisar 1.2 persen atau lima persen yang benar-benar membeli Tempo sendiri tanpa mengikuti pasangannya. Karena pola konsumsi ini maka Tempo lebih identik dengan majalah laki-laki. Salah satu alasan kuatnya adalah berita-berita yang ditampilkan kebanyakan ditulis dari sudut pandang laki-laki, perempuan dianggap jarang ingin membaca berita berat seputar politik. Ketika artikel RDP diturunkan maka tidak nampak sebuah dominasi atas perempuan yang cenderung melanggengkan kesadaran palsu dari setiap pekerja wanita di media Tempo. Karena sebuah rutinitas yang ada dianggap sebagai kelaziman. Pada Jengjang Sosiokultural, peneliti menginterpretasikan bahwa kajian mengenai pemahaman politik seksual

dalam sebuah wacana dapat ditarik ke dalam relasi hegemonik peran yang dominan dari laki-laki terhadap perempuan. Sehingga upaya untuk membongkar ketertindasan atas stereotip perempuan tidak berdaya dianggap tidak kompeten dalam wawasan politiknya, hal ini dapat dikategorikan sebagai upaya membangun kesadaran yang inheren dengan perjuangan feminisme liberal atau sosial. Bila merujuk pada metode kritis Fairclough (1998) maka Fairclough berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah bagaimana bahasa menyebabkan kelompok sosial yang ada bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing. Konsep Fairclough mengasumsikan dengan melihat praktik wacana bisa jadi menampilkan efek sebuah kepercayaan (ideologis) artinya wacana dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas dimana perbedaan itu direpresentasikan dalam praktik sosial. Penelitian ini melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana dipandang menyebabkan hubungan yang saling berkaitan antara peristiwa yang bersifat melepaskan diri dari dari sebuah realitas, dan struktur sosial. Dalam hal ini dari penjelasan Norman Fairclough dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya dalam analisis wacana seorang peneliti atau penulis melihat teks sebagai hal yang memiliki konteks baik berdasarkan "*process of production*" atau "*text production*"; "*process of interpretation*" atau "*text consumption*" maupun berdasarkan praktik sosiokultural. Dengan demikian, untuk memahami wacana (naskah atau teks) kita tak dapat melepaskan dari konteksnya.

Tanggapan Pelbagai Media Massa mengenai Artis Perempuan Politisi

Sebagian besar pemahaman tentang keterlibatan artis hanya sebatas pada upaya mencari sensasi. Ini terlihat dari pengamatan penulis pada beberapa media massa menjelang atau dalam rangka Pemilihan Umum 2009 nanti. Hampir secara bersamaan media-media yang ada di Indonesia tidak pernah luput mengangkat tema selebritas politisi. Beberapa diantaranya justru menempatkan artis sebagai figuran politik seperti

dalam survei Kompas periode 13-14 Agustus 2008. Merujuk pada survei Kompas dengan responden sebanyak 837 orang dengan usia di atas 17 tahun ke atas menyatakan 75 persen menyatakan tidak setuju keterwakilan artis sebagai wakil rakyat. Survei ini tidak memberikan opsi atas kiprah artis yang memiliki kapital intelektual dan kompetensi di bidang politik seperti Nurul Arifin dan Marissa Haque.

Simpulan

Pendekatan perbedaan gender dalam teks menjelaskan sekaligus memberikan pemahaman yang terjadi dalam realitas yang dipercaya sebagai hasil konstruksi dari proses media. Pendekatan gender ini telah memberikan legitimasi untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang inheren sejak lahir, yaitu yang melekat dalam bentuk jasmani. Sedangkan penandaan dalam bentuk pemikiran yang membangun persepsi atau sebaliknya adalah proses dari interaksi sosial yang didalamnya terdapat dominasi dari kelompok lain dalam hal ini budaya patriarkhi dalam konteks media yang menjadikan isu utama perempuan menjadi sebuah komoditas. Dalam penelitian terkait wacana artis politisi di Indonesia, tulisan ini memaparkan dengan melihat proses bagaimana perbedaan-perbedaan yang terjadi karena pengaruh bahasa yang digunakan untuk menggambarkan realitas perempuan yang tidak adil atau berbeda dalam berpolitik. Fenomena konstruksi tersebut juga tidak bisa dilawan dalam sebuah struktur produksi teks yang menciptakan marjinalisasi kebebasan berekspresi seorang reporter perempuan dalam struktur organisasi yang cenderung patriarkhal. Sejalan dengan pemikiran Pharr bahwa konstruksi yang identik dengan sifat hipokrit, yaitu pemberitaan rubrik Pokok dan Tokoh Tempo tidak lepas dari penetrasi pesan media. Pesan melalui proses produksi teks menjadi sedemikian rupa dengan tidak lepas dari unsur ideologi media yang menciptakan subordinasi peran laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwa angka pembaca perempuan hanya berkisar 1.2 persen atau lima persen yang benar-benar membeli Tempo. Akibat pola konsumsi ini maka Tempo lebih identik dengan majalah laki-laki. Salah satu alasan kuatnya adalah berita-berita yang ditampilkan keba-

nyakan ditulis dari sudut pandang laki-laki, perempuan dianggap jarang ingin membaca berita politik. Hasil riset ini semakin menguatkan bagaimana bahasa menjadi sebuah pertarungan wacana bagi kesetaraan peran perempuan yang hadir sebagai pembaca sekaligus objek berita yang berimbang. Riset ini memberikan rekomendasi bagi awak media untuk menjadikan teks sebagai arena pendidikan politik, memberikan kesempatan bagi para perempuan selebriti politisi yang kompeten untuk diliput secara adil dan berimbang.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktur DP2M DIKTI atas bantuan dana penelitian melalui hibah Penelitian Kajian Wanita tahun 2008/2009, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang mendukung perizinan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada wartawan dan pengelola Rubrik Pokok dan Tokoh Mingguan Tempo atas dukungan riset ini.

Daftar Pustaka

- Barker, Chris, 2002, *Cultural Studies; Theory and Practice*, Sage, London.
- Chaer, Abdul dan Leonie, Agustina, 1995, "Sosiolinguistik; Perkenalan Awal", Rineka Cipta, Jakarta.
- Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, 2001, LKiS; Yogyakarta.
- Entman, Robert M. Framing: Toward Classification of a Fractured Paradigm, dalam *Journal of Communication*, Vol.43 No.4/1993.
- Eryanto, 2002, "Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media", LkiS, Yogyakarta.
- Etkinson, Karen, 1993, *Language and Gender, Woman's studies: A reader*.
- Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse*, Edward Arnold, New York.
- , 1998, *Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse: The Universities*, Longman, London.

- <http://www.harianpelita.com> "Perekrutan Artis", diunduh tanggal 15 Maret 2008.
- <http://www.kompas.co.id>, diunduh tanggal 15 September 2008.
- <http://www.komunitasdemokrasi.com>, diunduh tanggal 21 September 2008.
- Majalah Tempo, Edisi 3-9 Desember 2007.
- Majalah Tempo, Edisi 2-8 Juni 2008.
- Majalah Tempo, Edisi 20 Oktober 2008.
- Millet, Kate, 1970, *Sexual Politics*, Doubleday and Co: New York.
- Pharr and Ellis S. Krauss, 1996, *Media and politics in Japan*, University of Hawaii Press, Honolulu.
- Sunarto, 2000, "Analisis wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak", Mimbar, Semarang.
- Turner, Graeme, 2004, *Understanding Celebrity*, Sage, London.
- Van Dijk, Teun A., 1997, Discourse as Interaction in Society, dalam Teun A. van Dijk (ed), *Discourse as Social Interaction: Studies a Multidiciplinary Introduction*, Volume 1, Sage, London.